

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam satu tahun. Sebagai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat

Renja Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selain itu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2021 ini merupakan acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021 dan selanjutnya Renja OPD ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung rencana program pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

- Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);

18. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengesahaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022.
19. Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
20. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud Renja Perubahan Perangkat Daerah**

Renja Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat telah dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

#### **2. Tujuan Renja Perubahan Perangkat Daerah**

Tujuan Renja Perubahan Perangkat Daerah ini adalah menyajikan data/informasi hasil kegiatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan sekaligus evaluasi yang mengungkapkan keberhasilan yang dicapai, analisis kinerja Perangkat Daerah, serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menentukan kebijakan pendidikan di masa yang akan datang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

**BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**BAB V. Penutup**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan IV

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	100%	93,86	93,86
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	91,94%	76,14	82,81
			Angka harapan lama sekolah	12,33 Tahun	12,25	99,35
			Angka melanjutkan sekolah	90,83%	91,24	100
			Nilai rata Ujian Nasional (UN)			
			- SD	210,21 Poin	0	0
			- SMP	236,21 Poin	0	0
		Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional	10 Warisan Budaya Tak Benda	9	90
			Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	4 Cagar Budaya	2	50

Capaian indikator sasaran masih menggunakan data tahun 2020, pada tahun 2021 ditargetnya pada triwulan ke-4, dikarenakan data penghitungan target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru bisa didapat per akhir Desember.

Untuk mendukung terlaksananya tujuan dan sasaran rencana kerja perubahan 2021 dapat dilihat pada perincian program dan kegiatan sebagai berikut :

## **A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

### **a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun 2021 indikator kinerja Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan dengan target program 2 bidang urusan total pagu Rp. 211.658.238.900,24,- terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan:

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	
		INDIKATOR	KELUARAN
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD</b>	<b>18 Dokumen</b>	<b>107.381.998</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	18 Dokumen	107.381.998
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>210.781.076.504,24</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	210.773.037.904,24

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun 4 Dokumen	4 Dokumen	1.578.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Dokumen	1 Dokumen	2.849.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun 1 Dokumen	1 Dokumen	1.359.900
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun 1 Dokumen	1 Dokumen	2.249.900
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang dilaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerahnya</b>	<b>20%</b>	<b>15.000.000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Formal 3 orang	3 Orang	15.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan administrasi umum perangkat daerahnya</b>	<b>15 Sub organisasi</b>	<b>98.195.398</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	3.901.000



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	16 Jenis	8.465.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	52.730.998
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU yang disediakan	3 SKHU	3.060.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	2.074.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun	1 tahun	27.964.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>336.800.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar 400 surat	400 Surat	1.330.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar 4 rekening	4 rekening	118.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 29 orang, Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran/Teknis tersedia 10 orang, Jumlah administrasi bank dan pembelian buku cek	29 orang	217.470.000

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>319.785.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	46 Unit	309.785.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	10.000.000

## 2. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2021 Indikator kinerja Persentase Penduduk Usia 5 – 18 Tahun yang mengikuti Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan dengan target program 94,15% total pagu Rp. 87.510.064.732,- terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan:

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	
		INDIKATOR	KELUARAN
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase SD Terakreditasi A</b>	<b>6%</b>	<b>56.202.920.518</b>
	<b>Persentase SD Terakreditasi B</b>	<b>47%</b>	
	<b>Persentase SD Terakreditasi C</b>	<b>45%</b>	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang SD (18 Sekolah), penambahan RKS 2 sekolah	1 Paket	1.131.570.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang layak	1 Paket	189.000.000

Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD	1 Paket	672.075.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Pendidikan (SD), gedung serba, pembangunan pagar guna/aula, pembangunan pagar	1 Paket	1.225.660.000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD 1 Paket	1 Paket	685.260.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD 1 Paket	1 Paket	11.094.855.600
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD 1 Paket	1 Paket	1.811.028.400
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD 1 Paket	1 Paket	186.960.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD 1 Paket	1 Paket	4.735.940.000
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Seragam Sekolah 5610 siswa	5610 siswa	3.472.558.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa penerima BPPM SD 25.948 siswa	215 sekolah	1.867.140.000

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang (SD), Jumlah Fasilitas Pendukung Sekolah (2 Sekolah)	1 Paket	2.430.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta US SD 5446 siswa	5446 siswa	Refocusing
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK penerima insentif	570 orang	2.122.200.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat Cakep 17 orang	17 orang	Refocusing
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah termonitoring BPPM dan Akreditasi Sekolah 243 sekolah	243 sekolah	38.851.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima BOS SD 178 Negeri 37 Swasta	215 sekolah	24.451.569.818
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah termonitoring BOS (267 sekolah)	1 Paket	88.252.700
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase SMP terakreditasi A</b>	<b>13%</b>	<b>24.275.285.442</b>
	<b>Persentase SMP terakreditasi B</b>	<b>46%</b>	
	<b>Persentase SMP terakreditasi C</b>	<b>41%</b>	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah pelaksanaan DAK Reguler Pendidikan SMP	1 paket	228.000.000
Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pelaksanaan DAK Reguler Pendidikan SMP	1 paket	150.000.000

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pelaksanaan DAK Reguler SMP	1 paket	222.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah pelaksanaan DAK Reguler SMP, rehabilitasi ruang kelas 1 sekolah	1 paket	3.173.760.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah pelaksanaan DAK Reguler SMP	1 paket	1.194.007.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pelaksanaan DAK Reguler SMP	1 paket	419.520.000
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pelaksanaan DAK Reguler SMP	1 paket	30.019.000
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Pakaian Seragam	5150 siswa	3.438.669.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa penerima BPPM SMP 9.755 Siswa	55 sekolah	1.132.605.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pelaksanaan DAK Reguler SMP, fasilitas pendukung sekolah dan sekolah penerima Laptop dan Jaringan Komputer Penunjang UNBK SMP	1 paket	1.466.562.500
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	4620 siswa	Refocusing
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima tunjangan	418 orang	1.182.299.000

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta workshop seni budaya 65 orang dan jumlah peserta diklat cakep SMP 12 orang	77 orang	38.784.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1 paket	33.189.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima BOS SMP 48 Negeri 9 Swasta	57 Sekolah	11.496.896.042
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pelaksanaan Monitoring BOS 4 kali	4 kali	68.974.400
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persentase PAUD terakreditasi B</b>	<b>20%</b>	<b>4.865.567.697</b>
	<b>Persentase PAUD terakreditasi C</b>	<b>28%</b>	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah Penerima Penambahan ruang kelas baru	2 Sekolah	166.500.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1 Paket	200.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sekolah penerima rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas PAUD	3 TKN	Refocusing
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah sekolah penerima bantuan DAK BOP PAUD	5 TKN	223.948.797
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa penerima BPP PAUD	18 sekolah	418.156.000

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima tunjangan	138 orang	340.892.900
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	persentase pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	100%	Refocusing
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD (169 sekolah) dan Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD (180 Sekolah)	1 paket	195.000.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD	jumlah sekolah penerima DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	18 TKN	3.255.600.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah penerima BOP PAUD termonitoring (151 swasta dan 18 negeri)	1 Paket	65.470.000
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>	<b>Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan</b>	<b>11 Lembaga</b>	<b>2.166.291.075</b>
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB	1 Paket	100.000.000

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB	1 Paket	99.999.875
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan (Paket A,B,C) 11 lembaga dan penerima Belanja Operasional 1 SKB	1 paket	315.385.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah sekolah peserta Sosialisasi dan Monitoring Manajemen Akreditasi Sekolah PNFI	12 lembaga	475.000.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah penyelenggaraan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	100%	1.175.906.200

### 3. Program Pengembangan Kurikulum

Program pada tahun 2021 Indikator kinerja jumlah mata pelajaran muatan lokal pada kurikulum muatan lokal dengan target program 1 Mata Pelajaran total pagu sebesar Rp.304.344.100,- terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan:

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	
		INDIKATOR	KELUARAN
<b>Penetapan Kurikulum Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>Jumlah kurikulum PAUD dan Non Formal</b>	<b>1 Mata Pelajaran</b>	<b>159.344.100</b>
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Paket	159.344.100



<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>Jumlah kurikulum PAUD dan Non Formal</b>	<b>1 Mata Pelajaran</b>	<b>145.000.000</b>
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Kurikulum PAUD	1 Paket	145.000.000

**B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

**1. Program Pengembangan Kebudayaan**

Indikator kinerja program pada tahun 2021 jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dengan target program 7 WBTB total pagu sebesar Rp. 1.905.410.000,- terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan:

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	
		INDIKATOR	KELUARAN
<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah WBTB yang terdokumentasi</b>	<b>6 WBTB</b>	<b>418.111.000</b>
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah peserta sosialisasi pengelolaan budaya tradisional lampung barat (80 orang), jumlah peserta kegiatan lawatan sejarah (100 orang), jumlah peserta kegiatan peningkatan sumberdaya tenaga kebudayaan (45 orang)	30 orang	418.111.000

<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pagelaran seni dan study peningkatan SDM</b>	<b>1 Kali</b>	<b>1.405.000.000</b>
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	jumlah pelaksanaan kegiatan seni gelar seni, fasilitas seni dan misi kesenian	1 kali	1.405.000.000
<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat</b>	<b>100%</b>	<b>82.299.000</b>
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	jumlah rumah adat dan rumah tradisional	8 rumah adat	82.299.000

## 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Indikator kinerja program pada tahun 2021 Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan dengan target program 17 orang total pagu sebesar Rp. 752.376.000,- terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan:

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	
		INDIKATOR	KELUARAN
<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan</b>	<b>10 orang</b>	<b>752.376.000</b>
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM dan lembaga kesenian tradisional yang terbina	10 orang	645.000.000

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	jumlah sanggar seni sekolah	1 Paket	107.376.000
--	-----------------------------	---------	-------------

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 16 kegiatan dan jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak 74 subkegiatan.

Alokasi dana tahun 2021 untuk Belanja sebesar Rp.302.130.433.732,24,- terealisasi sampai dengan triwulan IV (bulan November) sebesar Rp. 241.631.321.426,- atau 79,98 persen.

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 65 subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen yaitu:

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar 90,97 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
2. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik/output sebesar 81,82 persen dikarenakan pembayaran gaji dilaksanakan setiap bulan.
3. Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD realisasi fisik/output sebesar 49,99 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD fisik/ output belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan pada bulan Desember.
5. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD realisasi fisik/output sebesar 45,52 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
6. Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran realisasi fisik/output sebesar 49,35 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
7. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi belum terealisasi dikarenakan belum adanya undangan pelatihan.

8. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi fisik/output sebesar 75,01 persen dikarenakan pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disesuaikan dengan kebutuhan.
9. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi fisik/output sebesar 79,92 persen dikarenakan honor tenaga kebersihan baru dibayarkan sampai dengan bulan September dan pembelian peralatan kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan.
10. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi fisik/output sebesar 84,80 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember
11. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi fisik/output sebesar 70,96 persen dikarenakan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan.
12. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik/output sebesar 65,94 persen dikarenakan pengiriman atau surat keluar untuk saat ini menggunakan media elektronik (whatsapp, email) pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan.
13. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik/output sebesar 41,93 persen dikarenakan tagihan rekening baru dibayarkan sampai bulan November dan pembayaran disesuaikan dengan tagihan.
14. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik/output sebesar 86,15 persen pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
15. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi fisik/output sebesar 61,55 persen pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
16. Subkegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru (SD) realisasi fisik/output sebesar 68 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
17. Subkegiatan Penambahan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD) realisasi fisik/output belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan pada bulan Desember.
18. Subkegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD) realisasi fisik/output sebesar 68,10 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.

19. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) realisasi fisik/output sebesar 40,56 persen dikarenakan penyelesaian pada bulan Desember..
20. Subkegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (SD) realisasi fisik/output sebesar 68,23 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
21. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (SD) realisasi fisik/output sebesar 66,42 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
22. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD) realisasi fisik/output sebesar 85,77 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
23. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) realisasi fisik/output sebesar 67,51 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
24. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga (SD) realisasi fisik/ output sebesar 62,03 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
25. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SD) realisasi fisik/output sebesar 88,68 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
26. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SD) realisasi fisik/output tidak terealisasi dikarenakan Refocusing Anggaran.
27. Subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) realisasi fisik/output sebesar 83,29 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
28. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar realisasi fisik/output tidak terealisasi dikarenakan Refocusing Anggaran.

29. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah realisasi fisik/output sebesar 35,65 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
30. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar realisasi fisik/output sebesar 81,03 dikarenakan pelaksanaan masih dalam proses berikutnya pada bulan Desember.
31. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar realisasi fisik/output belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan kegiatan dibulan Desember.
32. Subkegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru (SMP) realisasi fisik/output belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan kegiatan dibulan Desember.
33. Subkegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir (SMP) realisasi fisik/output belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan kegiatan dibulan Desember.
34. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP) realisasi fisik/output belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan kegiatan dibulan Desember.
35. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP) realisasi fisik/output sebesar 67,13 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
36. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (SMP) realisasi fisik/output sebesar 67,80 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
37. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas (SMP) realisasi fisik/output sebesar 69,19 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
38. Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah (SMP) realisasi fisik/output belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan kegiatan dibulan Desember.
39. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama realisasi fisik/output sebesar 89,59 persen dikarenakan sejumlah 8 sekolah swasta belum mengumpulkan proposal pencairan dan pencairan sekolah swasta dilaksanakan 1 tahun sekali.
40. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SMP) realisasi fisik/output sebesar 75,51 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.

41. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMP) realisasi fisik/output tidak terealisasi dikarenakan Refocusing Anggaran.
42. Subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) realisasi fisik/output sebesar 79,22 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
43. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP) realisasi fisik/output 13,22 persen pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
44. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama realisasi fisik/output sebesar 81,96 persen dikarenakan pelaksanaan masih dalam proses berikutnya pada bulan Desember.
45. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama realisasi fisik/output sebesar 19,44 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada Desember.
46. Subkegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD realisasi fisik/output sebesar 42,41 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
47. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD realisasi fisik/output sebesar 22,16 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
48. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD realisasi fisik/output tidak terealisasi dikarenakan Refocusing Anggaran.
49. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD realisasi fisik/output sebesar 88,06 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
50. Subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD realisasi fisik/output sebesar 83,16 persen dikarenakan pelaksanaan berikutnya pada bulan Desember.
51. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD realisasi fisik/output tidak terealisasi dikarenakan Refocusing Anggaran.
52. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD realisasi fisik/output sebesar 89,74 persen dikarenakan proses penyelesaian SPJ.

53. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD realisasi fisik/output sebesar 65,01 persen dikarenakan menunggu dana dari pusat pelaksanaan masih dalam proses berikutnya pada bulan Desember.
54. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan realisasi fisik/output sebesar 90 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
55. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan realisasi fisik/output sebesar 40 persen pelaksanaan baru sampai tahap II dikarenakan menunggu dana dari pusat, penyelesaian kontrak sampai bulan Desember.
56. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan realisasi fisik/output sebesar 69,73 persen dikarenakan sedang proses SPJ.
57. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan realisasi fisik/output sebesar 43,16 persen dikarenakan tidak ada pengajuan pencairan (hibah).
58. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan realisasi fisik/output sebesar 65,44 persen dikarenakan dana terikat aturan yang ada di aplikasi BOP sehingga dana tidak terserap.
59. Subkegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar realisasi fisik/output belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan di bulan Desember.
60. Subkegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal realisasi fisik/output sebesar 34,48 persen dikarenakan masih dalam proses pengajuan pencairan hibah penyelesaian sampai dengan bulan Desember.
61. Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan realisasi fisik/output sebesar 66,46 persen dikarenakan masih dalam proses penyelesaian SPJ dan administrasi pencairan hibah.
62. Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya realisasi fisik/output sebesar 83,27 persen dikarenakan masih dalam proses penyelesaian SPJ dan administrasi pencairan hibah.
63. Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat realisasi fisik/output sebesar 57,06 persen dikarenakan terdapat satu rumah adat yang tidak lagi diberikan bantuan pemeliharaan.



64. Subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional realisasi fisik/output sebesar 64,52 persen dikarenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan sesuai dengan jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing mahasiswa.
65. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional realisasi fisik/output belum terealisasi dikarenakan masih dalam proses penyelesaian SPJ.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Rencana Kerja**

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, yang mencakup acuan indikasi rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada tahun 2021 yang dirinci menurut fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing sebagai upaya untuk mendayagunakan sumber daya yang ada guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak serta mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

#### **3.2 Pendanaan**

Pendanaan Program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Dalam menetapkan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 s.d 2022, harus menyiapkan pendanaan program pembangunan lima tahun kedepan.

Dirinci sebagai berikut :

- Jumlah anggaran Belanja pada RKP/Dirjen Murni tahun 2021 sebesar Rp.299.581.778.938,-
- Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni tahun 2021 sebesar Rp.308.189.537.840,-
- Jumlah anggaran yang bertambah akibat refocusing tahun 2021 sebesar Rp 0,-
- Jumlah anggaran yang berkurang akibat refocusing tahun 2021 sebesar Rp.1.019.387.170,-
- Jumlah anggaran setelah apbd perubahan 2021 sebesar Rp.302.130.433.732,24,-

- Jumlah subkegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat refocusing tahun 2021 sebanyak 0 (nol) sub kegiatan
- Jumlah subkegiatan yang baru muncul akibat refocusing tahun 2021 sebanyak 0 (nol) sub kegiatan
- Jumlah subkegiatan yang direncanakan **ditunda** pelaksanaannya pada **Perubahan APBD** tahun 2021 sebanyak 0 subkegiatan
- Jumlah subkegiatan yang **baru muncul** pada **Perubahan APBD** tahun 2021 sebanyak 8 subkegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah dan pembangunan pendidikan yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Renja-OPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 pada prinsipnya menjelaskan: (1) Pendahuluan, (2) Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu, (3) Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, dan (4) Penutup. Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020, agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat.

### **4.2. Saran**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang dan langkah-langkah perbaikan ditingkat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, disamping

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang Pendidikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan kegiatan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Liwa,      November 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Barat,

**BULKI, S. Pd., M.M**

NIP. 19690915 199408 1 001